



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja organisasi perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Bappeda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini merupakan tahun untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bappeda Kabupaten Maros menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Bappeda mengacu pada RPJMD Kabupaten Maros. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Maros tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Maros yang memiliki fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Renja Bappeda akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD Bappeda dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Maros Tahun 2020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. MAKSUD**

Penyusunan Renja-SKPD dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maros untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Kabupaten Maros selama tahun 2021.

#### **B. TUJUAN**

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2021 bertujuan memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Maros di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2018 disusun sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BAPPEDA yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari:

- **Sub Bab 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- Sub Bab 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- Sub Bab 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- Sub Bab 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD  
Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- Sub Bab 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisikan sub bab yang terdiri dari:

- Sub Bab 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Maros.

- Sub Bab 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Maros.

- Sub Bab 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; Tabel rencana program dan kegiatan.

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2021

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidahkaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2021 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Perubahan SKPD sampai dengan Tahun 2020. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

#### 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Bappeda Kabupaten Maros sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah telah di atur di dalam Peraturan Bupati Nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 77,28 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.982.400.000,-. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	382.712.700	344.557.765	90%
1	1 Pelayan Administrasi Umum Perkantoran	205.547.700	201.576.015	98%
1	2 Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	177.165.000	142.981.750	81%



1	3	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	0	0	0%
1	4	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	0	0	0%
1	5	Pengendalian Kegiatan OPD	0	0	0%
1	6	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	0	0	0%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KERJA APARATUR		477.525.800	472.670.000	99%
2	1	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	9.000.000	9.000.000	100%
2	2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	356.565.800	354.609.000	99%
2	3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	51.960.000	49.710.000	96%
2	4	Rehabilitasi Ruang Kantor	60.000.000	59.351.000	99%
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH		239.894.000	207.194.000	86%
3	1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	42.507.000	40.857.000	96%
3	2	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupten Maros Tahun 2021-2025	0	0	0%
3	3	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Pokok)	13.000.000	13.000.000	100%
3	4	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Perubahan)	12.250.000	10.250.000	84%
3	5	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	51.482.000	35.032.000	68%
3	6	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan DAK Fisik	3.990.000	3.990.000	100%
3	7	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	14.900.000	14.900.000	100%
3	8	Pengelolaan Data Dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan	19.380.000	19.380.000	100%
3	9	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan Penerapan SPM	3.885.000	3.885.000	100%
3	10	Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	24.200.000	22.700.000	94%
3	11	Implementasi E- Planning	41.400.000	31.800.000	77%
3	12	Evaluasi Dan Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	12.900.000	11.400.000	88%
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM		157.175.000	157.175.000	100%
4	1	Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Usaha	5.000.000	5.000.000	100%

4	2	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi Dan SDA	2.175.000	2.175.000	100%
4	3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Manusia	15.000.000	15.000.000	100%
4	4	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Sektor Ekonomi Dan SDA	5.000.000	5.000.000	100%
4	5	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	130.000.000	130.000.000	100%
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA		53.610.000	33.775.000	63%
5	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Sosial Budaya	3.100.000	3.100.000	100%
5	2	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's	19.950.000	14.175.000	71%
5	3	Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	20.050.000	11.900.000	59%
5	4	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sosial Budaya	0	0	0%
5	5	Monitoring Evaluasi Renja OPD Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya	10.510.000	4.600.000	44%
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)		69.285.000	59.325.000	86%
6	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan SDM	4.950.000	4.890.000	99%
6	2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan SDM	0	0	0%
6	3	Pengendalian Dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	24.425.000	20.125.000	82%
6	4	Monitoring Dan Evaluasi Penerapan PPRG, Germas, UKS Dan KLA	39.910.000	34.310.000	86%
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH		522.497.500	178.054.000	34%
7	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Lingkup Sektor Pembangunan Sarana Prasarana Daerah	4.120.000	2.000.000	49%
7	2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sarana Dan Prasarana Daerah	16.425.000	10.335.000	63%
7	3	Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	363.033.500	40.100.000	11%
7	4	Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Sekolah (SSS)	5.000.000	1.000.000	20%
7	5	Penyelenggaraan Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)/Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan	133.919.000	124.619.000	93%

8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN		79.700.000	79.200.000	99%
8	1	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	1.900.000	1.900.000	100%
8	2	Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	8.500.000	8.000.000	94%
8	3	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pembangunan Wilayah Dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	61.200.000	61.200.000	100%
8	4	Penyusunan Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan	1.500.000	1.500.000	100%
8	5	Pelaksanaan Forum OPD Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	5.600.000	5.600.000	100%
8	6	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	1.000.000	1.000.000	100%
8	7	Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	0	0	0%
		TOTAL	1.982.400.000	1.531.950.765	77,28%

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya:

**1. Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran**

Jumlah kegiatan pada program ini sebanyak 6 (enam) kegiatan dengan anggaran program sebesar Rp. 382.712.700,- yang teralisasi sebanyak Rp. 344.557.765,- atau 90%.

**2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur**

Jumlah kegiatan pada program ini 4 (empat) kegiatan dengan anggaran program sebesar Rp.477.525.800,- yang teralisasi sebanyak Rp.472.670.000,- atau 99 %.

**3. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah**

Jumlah kegiatan pada program 12 (dua belas) kegiatan dengan anggaran program sebesar Rp. 239.894.000,- yang teralisasi sebanyak Rp. Rp. 207.194.000,- atau 86%.

**4. Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam**

Jumlah kegiatan pada program 5 (lima) kegiatan dengan anggaran program sebesar Rp. 157.175.000,- yang teralisasi sebanyak Rp. Rp. 157.175.000,- atau 100%.

**5. Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sosial Budaya**

Jumlah kegiatan pada program 5 (lima) kegiatan dengan anggaran program sebesar Rp. 53.610.000,- yang teralisasi sebanyak Rp. 33.775.000,- atau 63%.

## 6. Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah kegiatan pada program 4 (empat) kegiatan dengan anggaran program sebesar Rp. 69.285.000,- yang teralisasi sebanyak Rp. 59.325.000,- atau 86%.

## 7. Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah

Jumlah kegiatan pada program 5 (lima) kegiatan dengan anggaran program sebesar Rp. 522.497.500,- yang teralisasi sebanyak Rp. 178.054.000,- atau 34%.

## 8. Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Wilayah Dan Kawasan

Jumlah kegiatan pada program 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran program sebesar Rp. 79.700.000,- yang teralisasi sebanyak Rp. 79.200.000,- atau 99%.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Maros, yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Maros

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	I K K	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN				PROY EKSI	CAT. ANALISIS
				TAHUN (2016)	TAHUN (2017)	TAHUN (2018)	TAHUN (2019)	TAHUN (2020)	TAHUN (2016)	TAHUN (2017)	TAHUN (2018)	TAHUN (2019)	TAHUN (2020)	
1	Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	-	-	C	CC	B	BB	A	C	C	B	B	B	-
3	Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik"	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
4	Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
5	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
6	Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
7	Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100		100	100	100		100	-

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Maros mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang – undang yang berlaku, Bappeda Kabupaten Maros memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada dalamnya.

### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021. Hal ini berdasarkan atas hasil analisis kebutuhan akan adanya Peraturan Daerah Perencanaan dan Penganggaran guna meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang menjabarkan peraturan perencanaan dari tingkat pusat sehingga sering menimbulkan multitafsir diantara para pelaku perencanaan di daerah, hal ini disadari merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Adanya perbedaan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD, tetap menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJPD sampai dengan RKPD hingga Renja SKPD. Untuk program dan kegiatan Bappeda yang lain tidak ada yang mengalami perubahan.

Tabel 2.4.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. PENTING		
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.01.	PERENCANAAN				4.423.039.037	PERENCANAAN				4.423.039.037			
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100 Persen	3.414.936.537	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100 Persen	3.414.936.537	-		
			Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	100 Persen								Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	100 Persen
			Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100 Persen								Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100 Persen
			Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen								Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen

5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	A (Nilai SAKIP)	2.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	A (Nilai SAKIP)	2.500.000	
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000	
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	0,00 Persen	2.787.202.777	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	0,00 Persen	2.787.202.777	
5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.727.052.777	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.727.052.777	
5.01.01.2.02.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	12 Bulan	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	12 Bulan	8.000.000	
5.01.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	48.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	48.400.000	
5.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Atas Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Atas Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.750.000	

5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	100 Persen	48.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	100 Persen	48.000.000	
			Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,00 (Nilai Survey)				Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,00 (Nilai Survey)		
			Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik	100 Persen				Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik	100 Persen		
5.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Pcs	48.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Pcs	48.000.000	
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	100 Persen	331.458.760	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	100 Persen	331.458.760	
5.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	8 Jenis	7.687.260	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	8 Jenis	7.687.260	
5.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	9.109.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	9.109.500	
5.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	9 Jenis	7.630.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	9 Jenis	7.630.000	



5.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	51.597.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	51.597.000	
5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	23.580.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	23.580.000	
5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	12 Bulan	231.855.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	12 Bulan	231.855.000	
5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	100 Persen	34.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	100 Persen	34.400.000	
5.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor	16 Unit	34.400.000	Pengadaan Mebel	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor	16 Unit	34.400.000	
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	100 Persen	98.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	100 Persen	98.100.000	
5.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	2 Orang	16.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	2 Orang	16.500.000	
5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tersedia	12 Bulan	24.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tersedia	12 Bulan	24.000.000	
5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Orang	57.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda	Jumlah Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Orang	57.600.000	

5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	100 Persen	113.275.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	100 Persen	113.275.000	
5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Tersedia	1 Unit	13.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Tersedia	1 Unit	13.800.000	
5.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Kondisi Baik	3 Jenis	39.475.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Kondisi Baik	3 Jenis	39.475.000	
5.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	2 Unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	2 Unit	60.000.000	
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Maros	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100 Persen	623.435.500	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Maros	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100 Persen	623.435.500	-
			Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	100 Persen				Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	100 Persen		
			Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana	100 Persen				Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana	100 Persen		

			Pembangunan Nasional Dan Provinsi					Pembangunan Nasional Dan Provinsi			
			Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen				Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen		
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Maros	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	100 Pesen	523.835.500	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Maros	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	100 Pesen	523.835.500	
5.01.02.2.01.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Hasil Pengelolaan Data Dan Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	17.400.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Hasil Pengelolaan Data Dan Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	17.400.000	
5.01.02.2.01.02.	Koordinasi Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	16.270.000	Koordinasi Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	16.270.000	
5.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	43.655.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	43.655.000	

5.01.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	30.650.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	30.650.000	
5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	73.138.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	73.138.000	
5.01.02.2.01.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	41.250.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	41.250.000	
5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	301.472.500	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Kab. Maros	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	100 Pesen	301.472.500	
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	100 Pesen	23.375.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	100 Pesen	23.375.000	
5.01.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Hasil Pengelolaan Data Dan Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	23.375.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Hasil Pengelolaan Data Dan Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	23.375.000	

5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	100 Pesen	76.225.000	Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	100 Pesen	460.892.000	
5.01.02.2.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kab/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020, Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2020	2 Dokumen	34.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kab/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020, Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2020	2 Dokumen	34.000.000	
5.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Periodik	4 Dokumen	42.225.000	Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Periodik	4 Dokumen	42.225.000	
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Maros	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100 Persen	384.667.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Maros	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100 Persen	384.667.000	-
			Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	100 Persen					Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD		

			Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100 Persen				Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100 Persen		
			Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen				Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen		
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Maros	Persentase Kesesuaian Program Bidang Sosial Budaya Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen	178.641.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Maros	Persentase Kesesuaian Program Bidang Sosial Budaya Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen	178.641.000	
			Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen					Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Renja OPD Terhadap RKPD		100 Persen
5.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pemerintahan	22 Dokumen	18.650.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pemerintahan	22 Dokumen	18.650.000	

5.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	5.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	5.000.000	
5.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	4.700.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	4.700.000	
5.01.03.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	Jumlah Laporan Atas Hasil Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Renja OPD Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	65.100.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	Jumlah Laporan Atas Hasil Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Renja OPD Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	65.100.000	
5.01.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi Pendampingan Renja OPD Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	4.747.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi Pendampingan Renja OPD Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	4.747.500	
5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	6 Laporan	3.247.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	6 Laporan	3.247.500	

			Bidang Pembangunan Manusia					Bidang Pembangunan Manusia			
5.01.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	77.196.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	77.196.000	
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Maros	Persentase Kesesuaian Program Bidang Ekonomi Dan SDA Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen	80.344.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Maros	Persentase Kesesuaian Program Bidang Ekonomi Dan SDA Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen	80.344.000	
5.01.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	3.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	3.000.000	
5.01.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Dokumen	3.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Dokumen	3.000.000	



5.01.03.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Atas Hasil Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	33.122.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Atas Hasil Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	33.122.000	
5.01.03.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Atas Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	41.222.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Atas Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	41.222.000	
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Maros	Persentase Kesesuaian Program Bidang Infrastruktur Daerah Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen	125.682.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Maros	Persentase Kesesuaian Program Bidang Infrastruktur Daerah Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen	125.682.000	
			Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Wilayah dan Kawasan Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen				Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Wilayah dan Kawasan Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen		
5.01.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	11 Dokumen	34.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	11 Dokumen	34.000.000	

			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
5.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan KAK Kegiatan Secara Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	3 Dokumen	6.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan KAK Kegiatan Secara Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	3 Dokumen	6.500.000	
5.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	11 Dokumen	12.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	11 Dokumen	12.000.000	
5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	11 Dokumen	9.609.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	11 Dokumen	9.609.000	
5.01.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	11 Dokumen	10.135.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	11 Dokumen	10.135.000	

5.01.03.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	12.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	12.000.000	
5.01.03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	11 Dokumen	41.438.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	11 Dokumen	41.438.000	

## 2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rancangan rencana kerja Bappeda Kabupaten Maros dalam pembahasan forum Perangkat Daerah, guna pemeyelarasam rumusan rancangan Renja tahun 2021 serta kesepakatan dalam hasil musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

Dalam pelaksanaan Forum Perangkat daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku perangkat daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah lainnya, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan atau tidak ada dan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5.  
Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2021 adalah “Pemantapan Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Pelayanan Publik Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” yang dijabarkan menjadi 5 Prioritas Nasional yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda Kabupaten Maros. Renja tahun rencana 2021 merupakan penjabaran dari renstra perubahan 2016-2021 yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros, maka untuk menjawab tema pembangunan tahun 2020 yaitu “Pemantapan Pembangunan Ekonomi, SDM, Infrastruktur dan Pelayanan Publik Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 seperti yang nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.  
Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA 2020	SATUAN
1	Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Yang Baik Dan Bersih Di Lingkungan Bappeda	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Bappeda	Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	0,00	Persen
			Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	A	Nilai SAKIP
			Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal “Baik”	100	Persen
			Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,00	Nilai Survey

2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi Dan Akuntabel	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	100	Persen
			Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD	100	Persen
			Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi	100	Persen
			Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100	Persen

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Yang Baik dan Bersih Di Lingkungan Bappeda, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Kelembagaan Bappeda Yang Baik Dan Bersih.
2. Tujuan 2: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Bersinergi dan Akuntabel.

### 3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda. Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Urusan Penunjang Pemerintahan. Program - program tersebut berjumlah 3 program dengan 12 kegiatan dan 47 sub kegiatan serta total anggaran Rp. 4.423.039.037,- yang seluruhnya bersumber dari APBD.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 Kabupaten Maros secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Maros  
Tahun Anggaran 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.	PERENCANAAN				4.423.039.037				4.423.039.037
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	Bappeda	100 Persen	3.414.936.537	APBD		100 Persen	3.414.936.537
		Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD		100 Persen				100 Persen	
		Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	Bappeda	A (Nilai SAKIP)	2.500.000	DAU	Usulan OPD	A (Nilai SAKIP)	2.500.000
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	2 Dokumen	2.500.000	DAU		2 Dokumen	2.500.000
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK Pada Bappeda	Bappeda	0,00 Persen	2.787.202.777	DAU	Usulan OPD	0,00 Persen	2.787.202.777

5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	12 Bulan	2.727.052.777	DAU		12 Bulan	2.727.052.777
5.01.01.2.02.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Bappeda	12 Bulan	8.000.000	DAU		12 Bulan	8.000.000
5.01.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda	12 Bulan	48.400.000	DAU		12 Bulan	48.400.000
5.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Atas Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda	1 Dokumen	3.750.000	DAU		1 Dokumen	3.750.000
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	Bappeda	100 Persen	48.000.000	DAU	Usulan OPD	100 Persen	48.000.000
		Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Kesekretariatan		3,00 (Nilai Survey)				3,00 (Nilai Survey)	
		Persentase Pegawai Bappeda Dengan SKP Minimal "Baik		100 Persen				100 Persen	
5.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	60 Pcs	48.000.000	DAU		60 Pcs	48.000.000
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	Bappeda	100 Persen	331.458.760	DAU	Usulan OPD	100 Persen	331.458.760
5.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	Bappeda	8 Jenis	7.687.260	DAU		8 Jenis	7.687.260
5.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda	12 Bulan	9.109.500	DAU		12 Bulan	9.109.500
5.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda	9 Jenis	7.630.000	DAU		9 Jenis	7.630.000
5.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	12 Bulan	51.597.000	DAU		12 Bulan	51.597.000



5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda	12 Bulan	23.580.000	DAU		12 Bulan	23.580.000
5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	Bappeda	12 Bulan	231.855.000	DAU		12 Bulan	231.855.000
5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Bappeda	100 Persen	34.400.000	DAU	Usulan OPD	100 Persen	34.400.000
5.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor	Bappeda	16 Unit	34.400.000	DAU		16 Unit	34.400.000
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	Bappeda	100 Persen	98.100.000	DAU	Usulan OPD	100 Persen	98.100.000
5.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda	2 Orang	16.500.000	DAU		2 Orang	16.500.000
5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tersedia	Bappeda	12 Bulan	24.000.000	DAU		12 Bulan	24.000.000
5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda	8 Orang	57.600.000	DAU		8 Orang	57.600.000
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Bappeda	100 Persen	113.275.000	DAU	Usulan OPD	100 Persen	113.275.000
5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Tersedia	Bappeda	1 Unit	13.800.000	DAU		1 Unit	13.800.000
5.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Kondisi Baik	Bappeda	3 Jenis	39.475.000	DAU		3 Jenis	39.475.000
5.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	Bappeda	2 Unit	60.000.000	DAU		2 Unit	60.000.000

5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	Kab. Maros	100 Persen	623.435.500	APBD		100 Persen	623.435.500
		Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPJMD		100 Persen				100 Persen	
		Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Kab. Maros	100 Pesen	523.835.500	DAU	Usulan OPD	100 Pesen	523.835.500
5.01.02.2.01.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Hasil Pengelolaan Data Dan Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Maros	1 Dokumen	17.400.000	DAU		1 Dokumen	17.400.000
5.01.02.2.01.02.	Koordinasi Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	Kab. Maros	100 Pesen	16.270.000	DAU		100 Pesen	16.270.000
5.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	Kab. Maros	100 Pesen	43.655.000	DAU		100 Pesen	43.655.000
5.01.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPJMD Secara Tepat Waktu	Kab. Maros	100 Pesen	30.650.000	DAU		100 Pesen	30.650.000
5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPJMD Secara Tepat Waktu	Kab. Maros	100 Pesen	73.138.000	DAU		100 Pesen	73.138.000
5.01.02.2.01.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPJMD Secara Tepat Waktu	Kab. Maros	100 Pesen	41.250.000	DAU		100 Pesen	41.250.000

5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	Kab. Maros	100 Pesen	301.472.500	DAU		100 Pesen	301.472.500
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Kab. Maros	100 Pesen	23.375.000	DAU	Usulan OPD	100 Pesen	23.375.000
5.01.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Hasil Pengelolaan Data Dan Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Maros	1 Dokumen	23.375.000	DAU		1 Dokumen	23.375.000
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Kab. Maros	100 Pesen	76.225.000	DAU	Usulan OPD	100 Pesen	460.892.000
5.01.02.2.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kab/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020, Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2020	Kab. Maros	2 Dokumen	34.000.000	DAU		2 Dokumen	34.000.000
5.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Periodik	Kab. Maros	4 Dokumen	42.225.000	DAU		4 Dokumen	42.225.000
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD Yang Memiliki RENSTRA Yang Selaras Dengan RPJMD	Kab. Maros	100 Pesen	384.667.000	APBD		100 Pesen	384.667.000
		Persentase OPD Yang Memiliki RENJA Yang Selaras Dengan RKPD		100 Pesen				100 Pesen	
		Tingkat Keselarasan Antara Rencana Pembangunan Kabupaten Dengan Rencana Pembangunan Nasional Dan Provinsi		100 Pesen				100 Pesen	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Yang Ditindaklanjuti		100 Pesen				100 Pesen	

5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Bidang Sosial Budaya Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	Kab. Maros	100 Persen	178.641.000	DAU	Usulan OPD	100 Persen	178.641.000
		Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Renja OPD Terhadap RKPD		100 Persen				100 Persen	
5.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	22 Dokumen	18.650.000	DAU		22 Dokumen	18.650.000
5.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
5.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	1 Dokumen	4.700.000	DAU		1 Dokumen	4.700.000
5.01.03.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Atas Hasil Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Renja OPD Bidang Pemerintahan	Kab. Maros	1 Dokumen	65.100.000	DAU		1 Dokumen	65.100.000
5.01.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi Pendampingan Renja OPD Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Maros	1 Laporan	4.747.500	DAU		1 Laporan	4.747.500
5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Maros	6 Laporan	3.247.500	DAU		6 Laporan	3.247.500
5.01.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Maros	2 Laporan	77.196.000	DAU		2 Laporan	77.196.000

5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Bidang Ekonomi Dan SDA Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	Kab. Maros	100 Persen	80.344.000	DAU	Usulan OPD	100 Persen	80.344.000
5.01.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Maros	1 Dokumen	3.000.000	DAU		1 Dokumen	3.000.000
5.01.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Maros	7 Dokumen	3.000.000	DAU		7 Dokumen	3.000.000
5.01.03.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Atas Hasil Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Maros	1 Dokumen	33.122.000	DAU		1 Dokumen	33.122.000
5.01.03.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Atas Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Maros	1 Dokumen	41.222.000	DAU		1 Dokumen	41.222.000
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Bidang Infrastruktur Daerah Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	Kab. Maros	100 Persen	125.682.000	DAU	Usulan OPD	100 Persen	125.682.000
		Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Wilayah dan Kawasan Dalam Renja OPD Terhadap RKPD		100 Persen				100 Persen	
5.01.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Maros	11 Dokumen	34.000.000	DAU		11 Dokumen	34.000.000
5.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan KAK Kegiatan Secara Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	Kab. Maros	3 Dokumen	6.500.000	DAU		3 Dokumen	6.500.000

5.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Kab. Maros	11 Dokumen	12.000.000	DAU		11 Dokumen	12.000.000
5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Kab. Maros	11 Dokumen	9.609.000	DAU		11 Dokumen	9.609.000
5.01.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Maros	11 Dokumen	10.135.000	DAU		11 Dokumen	10.135.000
5.01.03.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Maros	1 Dokumen	12.000.000	DAU		1 Dokumen	12.000.000
5.01.03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Kab. Maros	11 Dokumen	41.438.000	DAU		11 Dokumen	41.438.000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Bappeda Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Rencana Kerja Beserta Pendanaannya Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.414.936.537	APBD
1	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.500.000	DAU
1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	DAU
1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.787.202.777	DAU
1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.727.052.777	DAU
1	2	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	DAU
1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.400.000	DAU
1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.750.000	DAU
1	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		48.000.000	DAU
1	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.000.000	DAU
1	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		331.458.760	DAU
1	4	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.687.260	DAU
1	4	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.109.500	DAU
1	4	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.630.000	DAU
1	4	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.597.000	DAU
1	4	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.580.000	DAU
1	4	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.855.000	DAU
1	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		34.400.000	DAU
1	5	1	Pengadaan Mebel	34.400.000	DAU

1	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98.100.000	DAU
1	6	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.500.000	DAU
1	6	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	DAU
1	6	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000	DAU
1	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		113.275.000	DAU
1	7	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.800.000	DAU
1	7	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.475.000	DAU
1	7	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	DAU
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			623.435.500	DAU
2	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		523.835.500	DAU
2	1	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	17.400.000	DAU
2	1	2	Koordinasi Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	16.270.000	DAU
2	1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	43.655.000	DAU
2	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	30.650.000	DAU
2	1	5	Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota	73.138.000	DAU
2	1	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	41.250.000	DAU
2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	301.472.500	DAU
2	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		23.375.000	DAU
2	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	23.375.000	DAU
2	3	Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		76.225.000	DAU
2	3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kab/Kota	34.000.000	DAU
2	3	2	Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	42.225.000	DAU



3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			384.667.000	DAU
3	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		178.641.000	DAU
3	1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.650.000	DAU
3	1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	DAU
3	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.700.000	DAU
3	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	65.100.000	DAU
3	1	5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.747.500	DAU
3	1	6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.247.500	DAU
3	1	7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	77.196.000	DAU
3	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		80.344.000	DAU
3	2	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.000.000	DAU
3	2	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.000.000	DAU
3	2	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	33.122.000	DAU
3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	41.222.000	DAU

3	3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	125.682.000	DAU
3	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.000.000	DAU
3	3	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.500.000	DAU
3	3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.000.000	DAU
3	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	9.609.000	DAU
3	3	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.135.000	DAU
3	3	6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.000.000	DAU
3	3	7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	41.438.000	DAU
			<b>TOTAL</b>	<b>4.423.039.037</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana (Renja) Kerja Tahun 2021 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Maros untuk tahun anggaran 2021 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Maros periode 2016 – 2021. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Maros, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Bappeda Kabupaten Maros.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam mewujudkan good governance di lingkungan Bappeda Kabupaten Maros, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang - bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bappeda Kabupaten Maros merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2021, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 dan Renstra Bappeda.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Maros atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Bappeda pada tahun 2021 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Bappeda Kabupaten Maros tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2021, yang berimplikasi terhadap akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian dokumen Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 3 Februari 2021  
**Kepala Bappeda,**  
  
**Drs. Muhammad Alwi, M. Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19681223 199503 1 002